DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Arifin, Bustanul, *Efektifitas Perpes Baru Untuk Persaingan Usaha,* (Jakarta: ASEAN Competition Institute, 2015).

Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta: Rineka Cipta, 2007). Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana,* (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 1996).

FAO, *Rice in Human Nutrition,* (Rome: FAO, 1993).

Hadi, Syamsul, *Kudeta Putih: Reformasi dan Kelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia,* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012).

Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1975).

Krisnamurti, Bayu, *Revitalisasi Pertanian Pangan,* (Jakarta: Departemen Pertanian, 2004).

Lamintang, P. A. F. , *Hukum Penitensier,* (Bandung: Armico, 1984).

Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Malik, Hermen, *Melepas Perangkap Impor Pangan,* (Jakarta: LP3ES, 2014).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Moch. Anwar, H. A. K, . *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi,* (Bandung: Alumni, 1979).

Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Huku,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung: Alumni, 1984).

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* (Jakarta: Kencana, 2010).

Nawawi Arief, Barda, *Perbandingan Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

----------, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Balai Penerbitan UNDIP, 1996).

----------, *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana,* (Bandung: PT Alumni, 1998).

----------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

----------, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, (FH UNDIP, Semarang, 1994).

Poernomo, Bambang, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia,* (Bandung: Rafika Aditama, 2003).

P. S, Djarwanto, *Pokok–Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi,* (Yogyakarta: Liberti, 1996).

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban,* (Jakarta: UKI Press, 2006).

Saleh, Ismael, *Pembangunan Hukum dalam Pembangunan dan Pembangunan di Bidang Hukum,* (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1986)

Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (*Jakarta: Radjawali Pers, 2010).

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1981).

---------, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: Alumni, 1981).

---------, *Hukum Pidana 1, (*Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 1990).

Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana Ekonomi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Suwitri, Sri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).

Winarno, *Dasar Dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah (*Bandung: CV. Tarsito, 1973).

Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer,* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2006).

Wiyono, R. *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia,* (Bandung: Alumni, 1983).

B. Kamus

Black's Law Dictionary, Seventh Edition, (St. Paul: West Group, 1999).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

C. Makalah dan Jurnal

Muladi, *Beberapa Tulisan Terkait Kebijakan Kriminal Dalam RUU KUHP,* (Jakarta, 26 September 2006).

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana),* Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, (FH UNDIP, Semarang, 1994).

Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman,* Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.

Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan–Undangan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sahetapy, *Ancaman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana,* Disertasi, 1978.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP

D. Peraturan Perundang–Undangan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang–Undang PRP Tahun 1960 Tentang Pergudangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pergudangan.

Undang–Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang–Barang (Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang–Undang.

Undang–Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang–Barang.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Malaysia, Price Control and Anti-Profiteering Act 2011, No 73, 24 Januari 2011.

Nigeria, Price Control Act 1977, No 47, 1 Januari 1977.

Philipine, The Price Act 1992, No 7581, 27 Mei 1992.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNDIP